

Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi

Antar Wilayah Se Sulawesi

(Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013)

Ritmon Amala, Abdul Rauf Mayang¹

IAIN Sultan Amai Gorontalo

ritmonamala@yahoo.co.id

Abstract

Differences in the level of development will increase the level of speed between regions, which in turn causes greater regional disparities. Sulawesi Island has six provinces where each province has different economic growth. The push of the economy in every province in Sulawesi Island in it shows a positive trend. This study aims to examine the inequality of economic development between regions in North Sulawesi (2000–2013). The data used uses GRDP time series data, Population and Per Capita Revenue from 2000-2013. The analysis process used is Williamson Index Analysis. The results showed that the GDP per capita index between provinces in Sulawesi Island during the period 2000-2013 averaged 0.167 with a positive trend. The region that has the highest Williamson Index for South Sulawesi Province is (0.32) with a positive trend, and the lowest is West Sulawesi Province (0.08) with a positive trend. As a whole, the provinces in Sulawesi are in the crestieria: $CVw < 0.35 =$ Low level unity. But if the higher Williamson Index means to connect between large regions, it must be immediately sought to reduce the economic level caused by the economy between regions left to be higher, can cause social, economic and political consequences that occur in the sense of national unity, can issue the country's economic stability

Keywords: *Inter-regional Economic Growth Gaps, Williamson Index*

PENDAHULUAN

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi merupakan masalah besar di banyak negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia pada awal orde baru para pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan hanya di sektor-sektor tertentu saja. Hal ini terjadi apabila dilihat dari skala yang lebih kecil, misalnya dalam lingkup provinsi se Sulawesi, beberapa provinsi di dalamnya mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa Provinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Tiap-tiap Provinsi tersebut

¹ Lecturer at State Islamic Institutet of Sultan Amai Gorontalo, Indonesia.

tidak mengalami kemajuan yang sama, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang di miliki. Di samping itu, banyak investor dan penanaman modal yang lebih ingin menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan, termasuk dalam menunjang kemudahan usahanya. Sehingga bagi daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas-fasilitas tersebut dimungkinkan akan relatif lebih tertinggal, hasilnya akan menyebabkan ketimpangan antar Provinsi semakin besar yang akan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan antar Provinsi tersebut.

Upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (disparity). Ketimpangan ekonomi yang paling jelas terlihat adalah pada aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang mengakibatkan adanya wilayah maju dan tertinggal serta aspek sektoral yang menyebabkan adanya sektor unggulan dan non unggulan.

Menurut Rustiadi, kesenjangan antar wilayah telah banyak menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu dibutuhkan kebijakan/program yang dapat mengatasi permasalahan kesenjangan antar wilayah, dan perencanaan yang mampu mewujudkan pembangunan yang berimbang. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.²

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar.

Pulau Sulawesi memiliki enam (6) Provinsi dimana setiap Provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari perekonomian nasional nya dalam setiap Provinsi di Pulau Sulawesi didalamnya menunjukkan trend positif dan meningkat meskipun terdapat dua Provinsi baru di dalamnya yaitu Provinsi Gorontalo yang di mekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi Sulawesi Barat yang baru dari tahun 2004 di mekarkan.

² Rustiadi, Ernan dan Sugimin Pranoto. 2007. Agropolitan, membangun ekonomi perdesaan. Crestpent Press. Bogor

Pada hakekatnya pembangunan daerah di anjurkan tidak hanya memutuskan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang di hasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang juga mengakibatkan pertumbuhan penduduk umur produktif meskipun dengan tenggang waktu secara tradisional di anggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Jelaslah bahwa hal ini akan tergantung pada kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap dan memperkejakan secara produktif tenaga kerja tambahan itu, suatu kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang terkait seperti keterampilan manajerial dan administrasi (Todaro 2000;84)

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi	2000-2010	2010-2015
Sulawesi Utara	1,28	1,15
Sulawesi Tengah	1,95	1,69
Sulawesi Selatan	1,17	1,12
Sulawesi Tenggara	2,08	2,18
Gorontalo	2,26	1,64
Sulawesi Barat	2,68	1,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017³

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa jumlah penduduk ke enam Provinsi se Sulawesi dari ke dua tahun dasar 2000 dan 2010 bergerak fluktuatif namun cenderung baik dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Dengan adanya 6 Provinsi Gorontalo yang terdapat pada Pulau Sulawesi banyak kekayaan akan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, pendapatan, serta perkembangan yang berbeda antar tiap daerah. Dimana tiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, sehingga kekayaan yang dimiliki tiap Provinsi pun berbeda-beda. Dalam artian tidak terjadi pemerataan pembangunan, dimana menyebabkan tidak terjadinya pertumbuhan

³ Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

ekonomi yang seimbang. Dilihat dari kesenjangan antar wilayah se Sulawesi, penulis ingin menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sehingga penelitian ini berjudul “Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se Sulawesi (Berdasarkan Data BPS tahun 2000-2013).

KAJIAN TEORI

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya rill per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional rill juga untuk meningkatkan produktivitas (*todaro*), jadi dalam ekonomi pembangunan tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja, tapi juga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut.⁴

Pertumbuhan digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang di ukur melalui persentase pertambahan pendapatan nasional rill. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang di ikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Para ahli ekonomi mempunyai keterkaitan terhadap masalah perkembangan pendapatan nasional rill. Masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan. Pembangunan ekonomi selalu di ikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita secara terus menerus. Sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu di ikuti kenaikan pendapatan perkapita.⁵

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat lebih banyak output dan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien. Pembangunan ekonomi terjadi saat terdapat lebih banyak output juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan tehnik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan,⁶

⁴ Todaro, M.P. dan Stephen C. S. 2006. *Pembanguna Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta

⁵ Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta Kencana

⁶ Ibid.,

Menurut Boediono Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi persentase pertumbuhan output itu haruslah lebih tinggi dan persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan ini akan berlanjut.⁷

2. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah

Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah *Sjafrizal* menyatakan kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kesenjangan ekonomi antar wilayah sering menjadi permasalahan serius karena beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan lambat. Hal ini dapat memicu migrasi penduduk dari wilayah terbelakang ke wilayah maju sehingga timbul permasalahan sosial ekonomi di wilayah maju. Selain itu, kemajuan perekonomian yang tidak sama di setiap wilayah dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antar wilayah. Apabila dibiarkan semakin parah, dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara Secara teoritik, permasalahan kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dijelaskan menggunakan Hipotesis Neoklasik.⁸

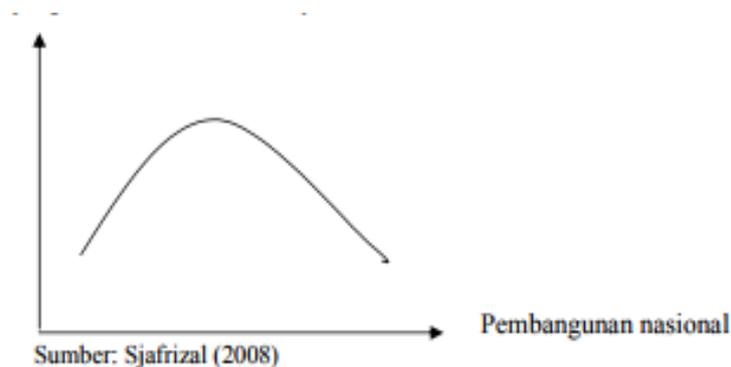
Penganut Hipotesis Neoklasik menyatakan pada permulaan proses pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai kesenjangan tersebut mencapai titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, maka secara berangsur-angsur kesenjangan ekonomi antar wilayah akan menurun. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru dimulai di NSB, peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedang daerah yang tertinggal tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM. Karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan maka kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Keadaan yang berbeda terjadi di negara maju dimana kondisi

⁷ Boediono, 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta BPFE

⁸ Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah

daerahnya umumnya dalam kondisi yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitas SDM. Dalam kondisi demikian, setiap peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Bort (1960) menjadi pelopor yang mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi Neoklasik, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. *Bort* menyatakan pada awal pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antar wilayah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja) kurang berjalan lancar. Dampaknya modal dan tenaga kerja akan terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah melebar (*divergen*). Bila pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya fasilitas maka mobilitas faktor produksi semakin lancar sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah akan berkurang (*convergen*). Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam kurva kesenjangan ekonomi antar wilayah yang berbentuk U terbalik. 12 Kesenjangan ekonomi antar wilayah .



Gambar 2.2 Kurva U terbalik⁹

Kebenaran Hipotesis Neoklasik ini diuji kebenarannya oleh *Jefrey G. Williamson* pada tahun 1966 melalui studi tentang kesenjangan ekonomi antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neoklasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empiris. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu

⁹ Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang

negara tidak otomatis menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi sebaliknya.

a. **Indikator Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah**

Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diukur menggunakan perhitungan indeks ketimpangan regional Williamson. Istilah indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada *Jeffrey G. Williamson* yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur kesenjangan ekonomi antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang. Secara statistik, indeks Williamson ini adalah *coefficient of variation* yang biasa digunakan untuk mengukur perbedaan. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Hal yang dipersoalkan bukan antara kelompok kaya dan miskin, tetapi antara daerah maju dan terbelakang. Dari indeks Williamson dapat diketahui kesenjangan ekonomi antar wilayah yang terjadi semakin melebar atau berkurang. Jika semakin tinggi nilai indeks Williamson, berarti kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar, dan sebaliknya.

Apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara masih tergolong dalam kesenjangan taraf tinggi, maka harus segera dicari solusi untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi tersebut karena apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dibiarkan semakin tinggi, dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

b. **Strategi Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah**

Adanya indikasi kesenjangan ekonomi antar wilayah menandakan terdapat beberapa daerah yang lebih cepat tumbuh, sedangkan beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi lambat. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah tersebut, maka pemerintah dapat menyusun prioritas untuk lebih membangun daerah-daerah yang tertinggal. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi wilayah mana saja yang masuk dalam kategori daerah yang tertinggal. Setelah diketahui daerah-daerah tertinggal. Kemudian dilakukan analisis faktor-faktor yang mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tersebut. Sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk

memajukan perekonomian daerah-daerah yang tertinggal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sudah maju. Sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dikurangi

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah kesenjangan wilayah se Sulawesi. Wilayah Sulawesi sengaja di ambil sebagai objek penelitian karena berdasarkan perkembangan actual perekonomian regionalnya, dimana terdapat ketimpangan jumlah PDRB yang dihasilkan oleh 6 (enam) Provinsi yang ada di wilayah Sulawesi tersebut. Sedangkan jangka waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima belas tahun (2000-2015). Gini ratio se Sulawesi beberapa tahun terakhir meningkat maupun nasional. Meskipun perekonomian nasional dalam ke 6 Provinsi tersebut terdapat 2 Provinsi baru yaitu Gorontalo merupakan Provinsi baru yang dimekarkan dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat yang baru dimekarkan sejak tahun 2004, tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi didalamnya menunjukkan *trend* positif dan meningkat. ini dikarenakan banyaknya pembangunan yang bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan juga sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif (Sudibyo, 1995). Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Data yang dipakai menggunakan data time series PDRB, Penduduk dan Pendapatan tahun 2000-2013. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Indeks Williamson. Batasan untuk tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah, yaitu:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{A_i}{A_{tot}}}}{\bar{y}} \quad \text{atau} \quad IW = \frac{1}{y} \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{A_i}{A_{tot}} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB perkapita provinsi i

\bar{y} = Rata-Rata PDRB Perkapita Seluruh Provinsi (Nasional)

A_i = Jumlah Penduduk Di Provinsi i

A_{tot} = Jumlah Penduduk Di Seluruh Provinsi Indonesia.

dengan kriteria :

$CVw < 0,35$ = Kesenjangan taraf rendah

$0,35 \leq CVw \leq 0,5$ = Kesenjangan taraf sedang

$CVw > 0,5$ = Kesenjangan taraf tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kondisi Makroekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang cukup menarik. Pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 1960 tercatat 2% per tahun dan kemudian mengalami peningkatan di atas 6% per tahun pada periode 1984-1993. Dari tahun 2000 sampai 2004, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,6% per tahun dan pada tahun 2005 sampai 2009 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5,8% per tahun.

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya diterpa oleh krisis ekonomi yang parah, sehingga pada tahun 1998 Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1%. Krisis ekonomi di negara-negara Asia pertama kali dimulai dengan terdepresiasinya mata uang Bath (Thailand). Kemudian depresiasi ini merembes dan menulari negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Sehingga kondisi perekonomian Indonesia sangat terpuruk.

Namun, seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia, berusaha untuk "mengobati" kondisi perekonomian Indonesia yang sedang sakit. BI berusaha menekan laju inflasi pada tahun 1998 sebesar 77,6% dengan menekan jumlah uang beredar di masyarakat melalui kenaikan tingkat suku bunga SBI. Kesenjangan wilayah se Sulawesi Pendapatan Perkapita se Sulawesi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Pendapatan Perkapita

Tahun	Gorontalo	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
2000	176758	532084	0
2001	182273	536115	0
2002	189614	546222	0
2003	198029	556050	0
2004	206954	572098	0
2005	216822	595043	304223
2006	227405	620735	316601
2007	239037	652472	331181

2008	251891	714282	361463
2009	264940	760650	373315
2010	279235	805345	407330
2011	295650	854291	440687
2012	313233	910316	471152
2013	332111	967114	495251
Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara
2000	393799	405537	317223
2001	409247	417733	326056
2002	420722	432464	340424
2003	438188	450284	358476
2004	455608	472985	377330
2005	477475	497093	396447
2006	503505	522594	418017
2007	529235	549737	442010
2008	563950	579391	464550
2009	592289	613971	489620
2010	633857	655113	519432
2011	674078	702734	553442
2012	722527	755901	597764
2013	769269	815616	627562

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, berbagai edisi.¹⁰

Dari gambar 3 diketahui bahwa tren rata-rata PDRB per kapita di Pulau Sulawesi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan bahwa seiring dengan pertumbuhan PDRB per kapita, produktivitas penduduk di Sulawesi lebih besar dibandingkan dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Sementara untuk laju pertumbuhan PDRB per kapita sendiri, capaian pertumbuhan tertinggi Meskipun menunjukkan peningkatan yang positif, masih terlihat terjadinya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi yang sangat timpang. Salah satu alasan rendahnya capaian PDRB tersebut adalah skala industri, dimana provinsi lain memiliki industri skala besar dan modern yang lebih banyak. Sementara untuk sektor pertanian, meskipun merupakan salah satu penyokong utama merupakan provinsi dengan kontribusi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang paling besar.

Pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tidak terlepas dari kontribusi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi rata-rata

¹⁰ BPS (2017). Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2000-2015. BPS Pusat

provinsi di pulau Sulawesi dapat dikatakan relatif merata yakni berkisar antara nilai rata-rata pertumbuhan 5,52% sampai dengan 7,79%.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kesenjangan antara region di Indonesia (antar provinsi, antar pulau maupun antar kawasan) tidak saja terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi namun juga kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode pengamatan cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat.

Penurunan persentase penduduk miskin di sebagian besar daerah berdampak secara akumulatif pada persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada periode 2001-2011 rata-rata sebesar 16,13%. Periode 2001-2004 persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001 persentase penduduk miskin sebesar 18,40% (37,9 juta jiwa) dan pada tahun 2004 menjadi 16,66% (34,15 juta jiwa). Periode 2005-2006 persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami peningkatan yakni masing-masing 16,69% (36,80 juta jiwa) dan 17,75% (39,30 juta jiwa).

Faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2006 antara lain disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi umum sebesar 17,95 persen pada Februari 2005 hingga Maret 2006. Selanjutnya periode 2007-2011 persentase penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 17% (38,39 juta jiwa) atau menurun sebesar 0,75% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 12,36% (29,79 juta jiwa). Adapun data kemiskinan pulau Sulawesi disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Data Angka Kemiskinan se Sulawesi

Tahun	Gorontalo	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
2000	33,87	12,03	0
2001	32,01	11,76	0
2002	32,12	11,22	0
2003	29,25	11,01	0
2004	29,00	9,79	0
2005	29,05	9,34	23,87
2006	29,13	11,54	20,74
2007	27,35	11,42	19,03
2008	20,47	9,08	16,73
2009	18,34	9,32	15,29
2010	16,55	9,59	13,58
2011	18,02	8,46	13,64
2012	17,22	7,63	13,01
2013	18,00	8,05	12,23
Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara
2000	15,90	25,90	25,97
2001	15,01	25,07	25,04
2002	14,30	24,89	24,22
2003	14,50	23,56	24,72
2004	13,60	23,42	24,00
2005	14,98	22,17	23,11
2006	14,57	21,16	20,98
2007	14,11	20,13	17,72
2008	13,41	18,07	17,30
2009	11,93	16,90	16,01
2010	11,40	16,07	15,69
2011	10,27	15,83	14,61
2012	9,46	14,94	13,05
2013	10,32	14,32	13,73

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, berbagai edisi.

Kemiskinan identik dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasar. Semakin miskin penduduk pengeluaran konsumsinya juga semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Tingkat kemiskinan di Indonesia sampai dengan tahun 2010 mencapai 13,33 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 14,15 persen. Kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan sektor pertanian tradisional sebagai mata pencaharian. Pola kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun diikuti pula oleh pola peningkatan konsumsi rumah tangga.

3. Kesenjangan antar wilayah se Sulawesi

Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Setiap daerah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar wilayah satu dengan yang lainnya. Perbedaan pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan potensi yang ada pada tiap daerah seperti sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan antar wilayah yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya disparitas pendapatan dan merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketimpangan antar provinsi di Sulawesi menggunakan indeks Williamson.

Tabel 4.3 Kesenjangan antar wilayah se Sulawesi

Tahun	Gorontalo	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
2000	0,05	0,15	0
2001	0,12	0,15	0
2002	0,12	0,15	0
2003	0,12	0,16	0
2004	0,12	0,16	0
2005	0,12	0,16	0,12
2006	0,12	0,16	0,12
2007	0,12	0,16	0,12
2008	0,12	0,15	0,12
2009	0,12	0,16	0,12
2010	0,12	0,16	0,13
2011	0,12	0,16	0,13
2012	0,12	0,16	0,13
2013	0,12	0,16	0,13
Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara
2000	0,33	0,17	0,16
2001	0,3	0,17	0,16
2002	0,33	0,17	0,16
2003	0,33	0,17	0,16
2004	0,33	0,17	0,17
2005	0,33	0,17	0,17
2006	0,31	0,17	0,18
2007	0,31	0,17	0,16
2008	0,3	0,17	0,16

2009	0,31	0,17	0,16
2010	0,31	0,16	0,17
2011	0,31	0,18	0,17
2012	0,31	0,18	0,17
2013	0,31	0,18	0,17

Sumber: Data di Olah. indeks Williamson (2018)

Masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi tersebut memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap kabupaten/kota. Perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan indeks ketimpangan PDRB per kapita antara Provinsi di Pulau Sulawesi selama periode 2000-2013 rata-rata sebesar 0,167 dengan trend positif. Wilayah yang mempunyai Indeks Williamson tertinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu (0,32) dengan trend positif, dan terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat (0,08) dengan trend positif. Secara keseluruhan wilayah Provinsi di Sulawesi berada pada kriteria : $CVw < 0,35$

= Kesenjangan taraf rendah. Namun jika semakin tinggi nilai indeks Williamson, berarti kesenjangan ekonomi antar wilayah semakin besar maka harus segera dicari solusi untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi tersebut karena apabila kesenjangan ekonomi antar wilayah dibiarkan semakin tinggi, dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuatlah kesimpulan untuk mencapai rumusan masalah sebagai berikut:

Hasil analisis menunjukkan indeks ketimpangan PDRB per kapita antara Provinsi di Pulau Sulawesi selama periode 2000-2013 rata-rata sebesar 0,167 dengan trend positif. Wilayah yang mempunyai Indeks Williamson tertinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu (0,32) dengan trend positif, dan terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat (0,08) dengan trend positif.

Secara keseluruhan wilayah Provinsi di Sulawesi berada pada kriteria : $CV_w < 0,35 =$ Kesenjangan taraf rendah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan sektor yang menyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi. Perlunya Pemberdayaan masyarakat kecil ada dan harus lebih digiatkan lagi.
2. Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap kesenjangan wilayah se Sulawesi, tapi tidak diuji pengaruh kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis keterkaitan ini karena ketimpangan dan kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1995. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta BPFE.
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Gorontalo*.
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Barat*
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan*.
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah*.
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- BPS (2000-2013). *Data PDRB Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara*.
- BPS (2017), *Data PDRB Se Sulawesi*. BPS Pusat.
- BPS (2017). *Gini Ratio Se Sulawesi tahun 2000-2015*. BPS Pusat.
- BPS (2017). *Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2000-2015*. BPS Pusat.
- Simreg.bappenas.go.id *data PDRB kab/kota Provinsi Se Sulawesi*.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah*
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta Kencana
- Todaro, M.P. dan Stephen C. S. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.